



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 11 Januari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **NANANG SETIAWAN**
2. Jabatan : **KEPALA BADAN**
3. NHK : **455136**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **2.780.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 193 m2/260 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 900.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 178 m2/178 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 355 m2/270 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 950.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 65 m2/21 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 60 m2/21 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 205 m2/116 m2 di KAB / KOTA GRESIK, HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **253.000.000**

1. MOTOR, HONDA CB150R Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 9.500.000
2. MOBIL, TOYOTA RUSH Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 175.000.000
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 15.000.000



4. MOTOR, YAMAHA LEXI Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp.
12.000.000
5. MOTOR, HONDA PCX Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp.
24.500.000
6. MOTOR, YAMAHA FAZIO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp.
17.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	68.500.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	395.435.000
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	3.496.935.000
III. HUTANG	Rp.	30.000.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	3.466.935.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.